KETIKA171BERGOLAK

(Studi Kasus Kerukunan Umat Beragama di Mataram)

Oleh: Sirajuddin Ismail

Abstrak

Sederetan konflik yang terjadi menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, dimana nilai budaya ketimuran Indonesia yang kental dengan nuansa agama, ramah dan santun berubah menjadi kurang terpuji, membawa kerugian baik moral maupun material, bahkan sampai kepada korbanjiwa. Yang menarik adalah terjadinya konflik pada daerah yang selama ini sangat menjunjung tinggi nilai agama dan kulturnya, seperti masyarakat Kota Mataram yang selama ini dikenal hidup rukun dengan multi agama, etnik dan kultur, tiba-tiba terjadi konflik SARA yang mengejutkan semua pihak, terutama pemerintah Kota Mataram.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kerusuhan yang terjadi di Kota Mataram mudah diredam karena masyarakatnya hanya ikutikutan. Masyarakat Sasak yang umumnya beragama Islam sangat patuh kepada ulama yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru. Dalam memelihara kerukunan umat beragama pasca kerusuhan (kerusuhan 171), pemerintah Kota Mataram bersama tokoh agama dan adat membentuk Forum Komunikasi Situasi Daerah (FOKOSIDA). Forum ini menjadi pengayom dan atau induk dari beberapa lembaga dan forum yang ada dan berfungsi sebagai sarana dialog dan komunikasi di antara mereka.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan bidang agama sebagai bagian integral pembangunan nasional, merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan

pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material spiritual.

Sesuai amanah GBHN 1999-2004, Pembangunan bidang agama diarahkan untuk: 1) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama, 2) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan Nasional, 3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanan pendidikan agama secara deskreptis yang tidak dogmatis, 4) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah, dan 5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejak akhir tahun sembilan puluhan, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah kerukunan antar dan intern umat beragama yang memprihatinkan. Konflik yang bernuansa sara di beberpa daerah di Indonesia sampai saat ini masih belum terselesaikan. Konflik yang berawal dari masalah sosial, ekonomi dan politik dapat berkembang menjadi konflik agama karena munculnya solidaritas antar kelompok yang berberbeda faham dan pandangan keagamaannya. Agama yang diharapkan menjadi pemersatu dalam masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu perpecahan antar kelompok masyarakat, hal ini antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang esensi ajaran agama, (Kamil, 2004). Menurut Iskandar hal seperti ini terjadi karena adanya kecenderungan salah memahami nilai agama dan diperparah dengan politisasi agama.

Masyarakat Indonesia dalam tiga dasawarsa ini sering terjadi konflik sosial yang bernuansa *sara* yang sangat membahayakan keutuhan bangsa, kesatuan dan persatuan, bahkan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil, walaupun masih terbatas pada suatu daerah tertentu, seperti di Ambon, Poso, Papua, bahkan terjadi di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sederetan konflik yang terjadi tersebut menunjukan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, dimana nilai budaya ketimuran bangsa Indonesia yang kental dengan agama, ramah dan santun berubah menjadi kurang terpuji, membawa kerugian baik moral maupun material, bahkan sampai pada korban jiwa. Yang menarik terjadinya konflik pada daerah yang selama ini sangat menjunjung tingga nilai agama dan kulturnya, seperti terjadi di Kota Mataram mereka hidup rukun dengan multi agama, etnik, dan kultur, dan tidak pernah terjadi gesekan yang mengarah pada konflik antar umat beragama, tiba-tiba terjadi konflik sara yang mengejutkan berbagai pihak terutama pemerintah Kota Mataram.

Telah diketahui bahwa berbagai konflik sosial dan kekerasan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Terkadang konflik dan kekerasan tersebut melibatkan berbagai komponen politik, sosial bahkan agama. Kesemuanya menuntut pemerintah dan masyarakat Kota Mataram mengantisipasi berbagai konflik yang terjadi dan dituntut untuk berbuat dan memelihara kerukunan pasca konflik agar tidak terjadi lagi konflik dimasa datang.

B. Masalah Penelitian

Masalah pokok pada penelitian ini, adalah kerukunan umat beragama pasca kerusuhan di Kota Mataram berangkat dari masalah pokok tersebut secara rinci dirumuskan masalah penelitian, yaitu apa dan bagaimana kerusuhan, bagaimana kerukunan umat beragama dan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen dalam masyarakat untuk memelihara kerukunan pasca kerusuhan di Kota Mataram.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa dan bagaimana kerusuhan yang terjadi, bagaimana kerukunan umat beragama dan bagaimana pemeliharaan kerukunan pasca kerusuhan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat agar kerukunan dan keamanan tetap konduksif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, khususnya bagi Depertemen Agama dan Depertemen terkait sebagai bahan penyusunan arah kebijaksanaan program pembinaan dan pelayanan terutama di dalam memelihara kerukunan umat beragama pasca kerusuhan di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori.

Konsep yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu konflik dan integrasi, dalam arti usaha pemeliharaan kerukunan pasca konlik. Kerukunan menurut Soemardjan, bahwa bentuk pokok interaksi sosial dapat merupakan kerja sama tapi dapat juga berbentuk persaingan, dan bahkan dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian. Suparlan (1991) mendifinisikan kerukunan, yaitu mengetahui adanya suatu perbedaan dan menghormati perbedaan tersebut.

Kerukunan sebagai interaksi sosial bersifat dinamis. Suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang semula rukun menjadi tidak rukun, sebaliknya suatu masyarakat yang sebelumnya tidak rukun dapat kembali menjadi rukun. Perubahan ini tergantung dari proses interaksi. Konsep kerukunan dapat pula dikaitkan dengan konsep integrasi dan pembahasan mengenai integrasi sering ditunjukkan pada salah satu teori dan dipandang relevan yakni teori fungsional yang menganggap bahwa masyarakat adalah salah satu sistem yang stabil yang terdiri atas kelompok yang selalu bekerja sama. Hal ini terjadi karena adanya konsensus atas kesamaan nilai yang dianut dan dikembangkan untuk mempersatukan masyarakat, karena itu ketertiban sosial merupakan hasil usaha tidak sadar dari orang untuk mengorganisasikan kegiatan mereka secara produktif (Mudzhar, 2003).

Lima faktor yang menyebabkan terjadinya konflik: 1) Ketika warga dari dua suku bangsa bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pecaharian hidup yang sama, 2) Ketika warga dari kedua suku bangsa tersebut memaksakan, unsur-unsurkebudayaan, 3) Ketika warga dari kedua suku bangsa memaksakan konsep agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama, 4) Kalau suatu suku bangsa berusaha menguasai suku bangsa lain secara politis, dan 5) proses terjadi konflik antar bangsa ketika telah bermusuhan secara adat (Koentjaraningrat, 1999).

Ali (2003) mengemukakan, bahwa kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan agama saja tidak serta merta mengakibatkan terjadinya konflik antara umat beragama. Agama dalam konflik sering berperan sebagai faktor pengiring yang meningkatkan eskalasi konflik. Identitas keagamaan dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk mencari dukungan, legitimasi dan memperkuat posisi masing-masing kelompok yang bertikai. Sementara faktor penyebabnya adalah faktor di luar agama. Faktor sosial, politik dan ekonomi

merupakan infra struktur terjadi konflik dan kerusuhan sosial. Sementara etnisitas dan agama dapat dipandang sebagai faktor komplementer yang menambah semakin mengerasnya kelompok maupun aktor yang terlibat konflik, apa lagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Etnis dan agama dapat menjadi sumber konflik dan kerusuhan sosial, tetapi kedua faktor tersebut lebih sering membutuhkan infra struktural lain untuk menyulut pecahkan konflik dan kerusuhan sosial dari pada sebagai faktor yang berdiri sendiri (Azra, 1999).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa konflik berpotensi terjadi pada setiap individu dan kelompok karena memiliki berbagai kepentingan, oleh sebab itu konflik terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya suatu kepentingan dan bila suatu kelompok dan individu memaksakan kehendak terhadap lainnya, baik berupa kultur, agama, maupun politik terutama jika mereka tidak memiliki rasa saling menghargai dalam hidup dan kehidupan sehingga individualitas dan simbol identitas kelompok lebih menonjol dari pada yang lain. Seakan-akan konflik itu mengarah pada hal yang negatif berupa pertentangan antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan, tetapi sebenarnya konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat, membangun solidaritas individu (kelompok) maupun hubungan antar warga negara

Integrasi sebagai salah satu proses kehidupan sosial merupakan alat yang bertujuan untuk menjadikan suatu keadaan budaya yang homogen, dan apabila homogenitas tercapai maka kelangsungan hidup kelompok dalam masyarakat akan terjamin. Integrasi sosial dimaksud sebagai penyatuan kembali kelompok yang terpisah dengan melenyapkan perbedaan dengan kebudayaan yang ada sebelumnya. Integrasi sosial sebagai proses diterimanya seorang individu pada suatu kelompok, (Vedayani, 1986). Demikian pula terjadi integrasi adalah akibat dari konflik yang memungkinkan adanya kesamaan dalam struktur sosial yang lebih luas. Nilai budaya tersebut dijadikan sebagai alat integrasi karena merupakan salah satu unsur yang dapat meredam konflik selain agama, politik, serta adat istiadat (Rahman, 1998). Biasa juga integrasi terjadi setelah didahului oleh perbedaan atau pertentangan dan terjadinya integrasi karena adanya persamaan melalui peraturan tertentu. Integrasi sosial makin dirasakan perlu karena proses pembangunan itu membawa berbagai perkembangan yang perlu mendapat perhatian yang sesungguhnya, proses pembangunan perlu melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat sekaligus merata. Pengaruh perkembangan terhadap peningkatan kualitas hidup berbeda-beda, ada yang maju lebih cepat dari yang lain, bahkan ada yang merasakan perubahan yang tidak menguntungkan. Pembangunan meningkatkan mobilitasi vertikal, bagi mereka yang dapat mempergunakan kesempatan yang baru terbuka, sehingga meningkatkan persaingan dalam masyarakat. Dalam proses mobilitas ini, terjadi pengelompokan yang menggeser peran kelompok masyarakat yang lain dalam bersaing, mungkin pula terjadi penguatan ikatan dan primordial lainnya.

Dalam menjaga kerukunan perlu ada suatu program untuk menumbuhkan toleransi serta sikap saling mengakui dan saling menghormati antar etnik, agama, ras, dan kelas sosial untuk diprogramkan dalam rencana pembangunannya, terutama di daerah dimana golongan tersebut hidup dan bersaing untuk memperebutkan kesempatan yang berhubungan dengan ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan agama.

Kerangka tersebut menunjukan bahwa konflik yang terjadi pada suatu agama adalah sebagai akibat antagonisme dalam pemikiran dan pengalaman agama itu sendiri. Agama juga membatasi konflik dan meningkatkan integrasi, seperti telah dikemukakan bahwa konflik dan integrasi tidak berlawanan, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan. Konflik secara alamiah menuju integrasi dan menghasilkan harmonisasi sosial

E. Metode Penelitian

1. Daerah penelitian

Sasaran penelitian, adalah Kota Mataram yang merupakan salah satu Kota dan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Penelitian lapangan

Pengumpulan data dilakukan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bulan Juli 2005 dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Setelah selesai surat izin penelitian pada KESBANG LINMAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KESBANG LINMAS Kota Mataram maka peneliti melakukan pengumpulan data sekunder melalui buku yang berhubungan dengan konflik integrasi, kerukunan hidup umat beragama, perubahan sosial, identifikasi lokasi, kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Kota Mataram.

Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara mendalam dengan Kepala KESBANG LINMAS Nusa Tengara Barat dan KESBANG Kota Mataram, Kepala Kanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat, Kepala Tata Usaha Departemen Agama Kota Mataram, Majelis Ulama Nusa Tenggara Barat dan tokoh agama di Kota Mataram, termasuk Kepala Bimbingan Agama pada Kanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat, antara lain kepala bimbingan agama Hindu, Katolik dan Kristen. Pada mereka diperoleh data tentang konflik Satu Tujuh Satu (171) dan apa yang mereka lakukan dalam usaha memelihara kerukunan hidup umat beragama, baik intern maupun ekstern, antara lain seperti yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, dan berbagai komponen masyarakat menurut versi mereka masing-masing.

Untuk melengkapi hasil wawancara dilakukan observasi terhadap Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel yang terletak di bagian Selatan kantor Wali Kota Mataram yang rusak akibat kerusuhan 171 yang hingga kini belum diperbaiki.

3. Analisa dan penyusunan laporan

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan sesuai degan sifatnya. Data yang sifatnya kualitatif, terutama dari hasil wawancara dan hasil pengamatan diolah secara kualitatif sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian.

Prosedur yang ditempuh, pertama-tama dilakukan pengelompokan data dengan memperhatikan data yang sejenis, begitu pula yang memiliki perbedaan antara satu sama lain. Kemudian dicari keterkaitan data tersebut, terutama faktor yang menghubungkannya. Interpretasi data dilakukan tanpa mengabaikan faktor emik dan etik.

II. HASIL PENELITIAN

A. Kerusuhan di Kota Mataram.

Banyak kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat, terkadang bersekala lokal (kecil) dan terkadang bersekala Nasional. Kerusuhan yang dikemukakan disini adalah yang bersekala Nasional dan diketahui oleh umum secara Nasional yang dikenal dalam masyarakat Kota Mataram dengan istilah kerusuhan Satu Tujuh Satu (171), yaitu kerusuhan yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2000 di Kota Mataram. Pada saat itu semua media massa dan media elektronik memberitakan sesuai dengan informasi mereka peroleh.

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum kerusuhan adalah suatu kota yang aman karena kota ini adalah

salah satu kota di Nusa Tenggara Barat dan terdapat di Pulau Lombok dan Lombok terkenal dengan Pulau Seribu Masjid, Kota Tuan Guru dan Kota Sejuta Santri karena di Kota Mataram banyak masjid, ulamanya disebut Tuan Guru, dan banyak memiliki pesantren, malah ada yang pesantren yang ada di Kota Mataram (NTB) milik dan asuhan Tuan Guru.

Kota Mataram yang terdiri atas berbagai etnik dan agama pada prinsipnya hidup rukun. Karena itu kerusuhan yang bernuansa *sara* fantara kaum Muslimin dengan Nasrani) yang terjadi di Kota Mataram mengejutkan semua fihak. Kerusuhan yang menimbulkan kerugian material maupun non material ini, dipicu oleh luapan emosi jamaah peserta tablig akbar sebagai wujud solidaritas terhadap sesama Muslim yang tertindas di Ambon. Kerugian material diperkirakan 6.5 Miliyar dengan rincian, 10 gereja dibakar, 2 dirusak dan 30 rumah, 26 pertokoan dirusak isinya dibakar dan dijarah, 10 mobil dan 7 sepeda motor dibakar. Sedangkan kerugian non material menelan 5 orang korban jiwa.

Selanjutnya menurut Hakim (informan), bahwa kerusuhan 171 di Kota Mataram disebabkan oleh lambannya pemerintah menyelesaikan persoalan konflik yang bernuansa Sara di Ambon yang menelan korban jiwa dan material yang tidak sedikit jumlahnya dan merupakan wujud dari kekecewaan kaum muslimin terhadap pemerintah dan KOMNAS HAM yang lamban menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan pada saat itu belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Disamping itu, seorang negarawan yaitu Muhaimiri Iskandar berpendapat, bahwa kerusuhan 171 di Kota Mataram dipicu oleh karena ada kecenderungan penganut agama salah memahami nilai agama yang dianutnya dan hal ini diperparah lagi oleh politisasi agama yang menyebabkan terbantainya umat Islam, sehingga menimbulkan korban jiwa dan material bagi kaum Muslimin di Ambon. Bahkan ada yang menganggap bahwa kerusuhan terjadi akibat adanya provokator dari Jakarta. Pembimas Kristen dan Katolik Kanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa kerusuhan tersebut terjadi akibat terlambatnya pemuatan berita permintaan maaf umat Kristiani yang ada di Kota Mataram melalui media masa Lombok Pos.

Selanjutnya Hakim mengemukakan, bahwa kerusuhan 171,berawal dari para peserta tablig akbar yang dilaksanakan di lapangan umum Mataram yang diselenggarakan oleh *PAMSWAKARSA AMPHBI* dan DPW Persaudaraan Pekerja Muslim (PPMI). Tablig akbar yang merupakan wujud dari kepedulian dan solidaritas kaum Muslimin Kota Mataram terhadap saudara mereka yang tertindas akibat dari konflik Ambon. Para peserta

dengan ikat kepala berwarna putih tiba-tiba menyerang gereja yang berada di sebelah Timur lapangan, yaitu Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel yang terletak di sebelah Selatan Kantor Wali Kota Mataram.

Hal tersebut menunjukan bahwa pelaku awal dari kerusuhan 171 adalah jamaah tablig akbar, tetapi di lapangan berbicara lain. Menurut salah seorang informan yang merupakan salah seorang jemaah tablig akbar, bahwa kerusuhan dengan aksi pembakaran terhadap Gereja Immanuel di Kota Mataram tidak dilakukan oleh para jemaah tablig akbar, karena pada saat itu para jamaah baru beranjak dari tempatnya masing-masing untuk meninggalkan lapangan tempat berlangsungnya tablig akbar dan pada saat itu pula bersamaan terjadi pembakaran Gereja Immanuel dan di mana-mana terdengar suara tembakan dari senjata aparat yang berusaha untuk mengamankan kerusuhan tersebut.

Secara rasional, tidak mungkin orang yang belum keluar dari lapangan yang membakar Gereja Immanuel dan serentak pula melakukan aksi di seluruh wilayah Kota Mataram dalam sekejap. Demikian pula pada berlangsungnya tablig akbar tidak pernah keluar sepatah kata pun dari para muballig bersifat menghasut untuk melakukan tindakan anarkis terhadap suatu agama, yang ada hanya doa bersama dengan harapan Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan, ketabahan bagi kaum Muslimin di Ambon dalam menghadapi kenyataan pahit dan cobaan yang tidak pernah diharapkan oleh pihak manapun di negara Pancasila ini.

Salah seorang informan mengemukakan bahwa kerusuhan 171 terjadi akibat ulah pihak ketiga (tanpa menyebutkan daerah asalnya), disamping itu juga menekankan bahwa pemicunya adalah akibat ulah media, baik media elektronik maupun media massa dengan pemberitaannya tentang intimidasi dan nasib yang dialami oleh kaum Muslimin di Ambon, yang mengakibatkan terbantainya kaum mereka yang tidak berdosa. Seharusnya, benta tersebut tidak perlu disiarkan karena akan membangkitkan solidaritas umat yang berlebihan, tidak terkendali dan salah satu bukti kaum Muslimin di Kota Martaram bangkit dan merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kaum Muslimin di Ambon dengan simbol solidaritas melakukan doa bersama di dalam suatu tablig akbar. Solidaritas terhadap konflik di Ambon bukan hanya terjadi di Kota Mataram tetapi terjadi dimana-mana dengan berbagai dimensi, antara lain seperti di Makassar melakukan *istigasha* (doa bersama). Hampir di semua jalan, mahasiswa mendirikan tenda dan dengan kardus di tangan bertulis "Peduli Ambon".

Ketika 171 Bergolak

107

B. Kerukunan Pasca Kerusuhan 171

1. Peran Pemerintah.

Wali Kota Mataram H. Muhamad Ruslan SH, kadang mengadakan pertemuan dengan alim ulama, cendekiawan, tokoh Agama dan tokoh masyarakat dengan melibatkan semua aparat (pejabat) dari semua instansi di wilayahnya antara lain seperti kepala Kandep Departemen Agama, DANREM, DANDIM, KAPOLRES, KESBAN LINMAS, Kejaksaan melalui lembaga FOKOSIDA (Forum Komunikasi Situasi Daerah) yang bertugas untuk memantau dan menyikapi situasi dan kondisi Kota Mataram. Struktur forum ini terdiri atas WaliKota sebagai ketua, sedangkan anggota adalah semua muspida dan instansi terkait yang berada di Kota Mataram. Dalam pertemuan ini ditekankan agar semua pejabat yang hadir untuk menciptakan kesejukan dan kerukunan hidup dalam masyarakat dan semua instansi terutama dinas dalam pemerintah Kota Mataram diinstruksikan agar memelihara dan menjaga kerukunan mulai dari tingkat individu sebagai abdi negara, rumah tangga dan pada lingkungan dimana berada, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap pemerintah dan masyarakat.

Semua orang menginginkan kerukunan karena salah satu hakikat manusi senang dan mengharapkan kebaikan, salah satu wujud dari kebaikan adalah kedamaian. Tidak ada suatu pun agama di dunia ini yang mengajarkan kepada umatnya hal yang negatif, artinya semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam hubungan secara vertikal pada Sang Pencipta maupun horizontal pada lingkungannya.

Oleh sebab itu Wali Kota Mataram tetap memantau situasi daerahnya dan berusaha mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan pendekatan kepada toma (tokoh masyarakat), toga (tokoh agama) dan ormas (organisasi massa) di daerahnya, juga mengharapkan pada media massa terbitan Nusa Tenggara Barat, dan media elektronik untuk berhati-hati dalam pemberitaan yang bisa memotivasi terjadinya kerusuhan baru dalam masyarakat. Demikian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menghormati walaupun berbeda etnik dan kultur karena dengan berprilaku seperti itu masyarakat akan merasa aman di dalam melakukan segala aktivitas dalam hidup dan kehidupannya sebagai warga dan masyarakat Kota Mataram.

Di dalam memelihara kerukunan yang sudah kondusif di dalam masyarakat Kota Mataram, pada suatu pertemuan FOKOSIDA, H. Muhammad Ruslan SH , merespon usulan dari berbagai pihak termasuk

dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Nasional tentang IMTAK (iman dan takwa) yang dilakukan di sekolah-sekolah dan seluruh instansi yang ada di Kota Mataram, demikian pula pada hari Krida (Sabtu) diisi pula dengan IMTAK dan hasil keputusan rapat tersebut menjadi instruksi Wali Kota Mataram yang harus diikuti dan dilaksanakan di tempat mereka masing-masing oleh semua pegawai, guru, dan siswa yang ada di wilayah Kota Mataram tanpa membedakan etnik dan agama. Pada hari Krida semua diwajibkan berbusana sesuai dengan simbol agama masing-masing, seorang muslim berpakaian busana Muslim, Hindu berpakaian Hindu dan bagi agama Kristen dan agama Katolik berpakaian putih hitam atau hitam putih, demikian pula agama Budha dan hal itu berlaku tanpa kecuali dan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 07.00 - 7.30 (setengah jam) diisi dengan IMTAK bagi setiap agama di tempatnya masing-masing, guru, tenaga edukasi, siswa dilakukan di sekolah, pegawai melakukannya di instansinya. Waktu setengah jam ini dilakukan dengan kegiatan keagamaan masing-masing, Islam melakukan pengajian, tadarrus Alquran, yasinan, tahlilan, doa bersama atau kegiatan yang bersifat Islami lainya. Kristen dan Katolik melakukan kebaktian secara oikomene. Hindu melakukan sembahyangan .

Disamping itu Wali Kota bekerjasama dengan masyarakat melalui toga, toma dan ormas berusaha melakukan relokasi pembangunan di Kota Mataram baik pembangunan spiritual maupun pembangunan material. Pemerintah membangun mental masyarakat, antara lain mengobati masyarakat yang stres akibat konflik, dan membangun bidang materialnya. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Mataram waspada dan memelihara kerukunan dalam masyarakat.

2. Peran Departemen Agama.

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram menyikapi instruksi tersebut dengan mengundang para ulama, Tuan Guru, tokoh agama, penyuluh, guru agama, Kepala KUA dan Pembantu PPN, pimpinan Majelis Taklim, pimpinan organisasi kemahasiswaan Muslim, maupun non Muslim, pimpinan organisasi kepemudaan untuk mensosialisasikan instruksi Wali Kota Mataram yang berupa seruan kerukunan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga Kota Mataram.

Kepala Kantor Departemen Agama pada setiap kesempatan selalu mengingatkan pada seluruh karyawan tentang seruan kerukukan dan selalu proaktif bersama semua pihak untuk menjaga kerukunan intern dan antara

umat beragama di lingkungannya dan tidak mudah terpancing oleh provokasi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kepada para muballig, khatib juga diharapkan untuk menyampaikan pesan kerukunan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara masing-masing.

Atas permintaan Wali Kota (H. Muhamad Ruslan SH), Departemen Agama Kota Mataram bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia melaporkan peta kehidupan keagamaan (tentang keberadaan Ahmadiyah Kadian) di Kota Mataram. Laporan itu berintikan, bahwa 1). Ahmadiyah Kadiyan sesat dan meyesatkan, artinya ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam. 2). Menimbulkan perpecahan antara umat di bidang ubudiyah. 3). Bila dibiarkan akan menimbulkan hal yang negatif ditengah masyarakat terutama kerusuhan intern umat Islam.

Laporan ini dijadikan acuan oleh Wali Kota Mataram maupun kejaksaan untuk menentukan boleh atau tidaknya pendirian suatu organisasi, pembentukan organisasi di suatu daerah adalah wewenang pemerintah setempat, sedangkan yang berhak untuk melarang kegiatan suatu organisasi adalah wewenang Kejaksaan. Kesemuanya dilakukan untuk menjaga kerukunan yang kondusif yang telah terbina pasca konflik 171.

3. Peran Masyarakat.

Seperti telah dikemukakan bahwa masyarakat juga berperan dalam memelihara kerukunan, dapat dilihat dua orang anggota masyarakat yang kebetulan adalah PNS (fungsional guru) berijtihad dengan melakukan semacam kultum pada setiap waktu *duha* (setiap hari) di sekolah tempat mereka mengabdi dan hal ini menjadi cikal bakal terjadinya kegiatan keagamaan pada hari *Krida* (Sabtu) dan dilakukan oleh setiap instansi dan sekolah yang terdapat di wilayah Kota Mataram.

Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman ajaran agama bagi siswa dan untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan (IMTAK) serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur, maka masyarakat pendidik di Kota Mataram memprogramkam pelaksanaan IMTAK pada seluruh sekolah dan diberbagai jenjang pendidikan yang terdapat di Kota Mataram. Pelaksanaan IMTAK-seperti telah dikemukakan di atas- dilaksanakan setengah jam (07.00 - 7.30) pada hari *Krida* (Sabtu) dan dilakukan oleh semua unsur dalam sekolah, etnik dan agama sesuai dengan keyakinan agamanya, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada tempat yang terpisah.

4. Peran Tokoh Agama.

a) Umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah para ulama dan cendekiawan Muslim, berperan membantu pemerintah dalam menyelesaikan dan memelihara kerukunan. Dalam konteks Mataram, lembaga MUI ini paling berperan dalam menyelesaikan maupun di dalam memelihara kerukunan umat beragama pasca kerusuhan 171 di Kota Mataram

Untuk memelihara dan menyikapi kondisi daerah yang kondusif pasca kerusuhan 171, FOKOSIDA senantiasa melibatkan semua elemen masyarakat termasuk MUI dalam setiap pertemuan membahas kondisi daerah termasuk usaha pemeliharan kerukunan umat beragama. Bekerjasama dengan Depertemen Agama Kota Mataram dan tokoh agama, FOKOSIDA membentuk forum komunikasi antar umat beragama dengan struktur MUI sebagai ketua, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram (sekretaris) dan para tokoh agama, yaitu Pendeta Slamet (Budha), DR.Gruduk (Hindu) dan tokoh dari agama Katolik dan Kristen sebagai anggota. Forum ini merupakan perpanjangan tangan dari FOKOSIDA yang bertugas untuk memberikan masukan yang diperlukan oleh FOKOSIDA.

b) Agama Katolik

Salah seorang informan mengungkapkan, bahwa bagi jemaat Katolik pada setiap melakukan *misa*, Pastor dalam pesan *misa-nya*. selalu mengungkapkan bahwa di dalam menyelesaikan dan memelihara kerukunan pasca konflik tidak boleh kita melihat siapa benai dan siapa salah, karena hal itu telah terjadi. Pastor senantiasa mengajak jemaat untuk instrokspeksi diri dan menjadikan konflik 171 sebagai tempat pembelajaraan yang berharga dan diharapkan pula berhati-hati di dalam berperilaku terutama dalam menata kehidupan bermasyarakat, menciptakan persaudaran karena agama Katolik adalah agama damai. Lebih baik mencari kebaikan dan kebersamaan dari pada mencari kambing hitam di dalam penyelesaian konflik.

Menindaklanjuti pesan kerukunan pastor tersebut, maka agama Katolik membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Katolik. Pada tahun 2003 forum ini menfasilitasi dialog antar umat beragama yang dilaksanakan di hotel Jayakarta, salah satu hotel yang terdapat di kawasan pariwisata bahari Senggigi di Pulau Lombok. Dialog ini dibuka oleh Gubernur Nusa

Tenggara Barat dan sekaligus bertindak sebagai narasumber. selain dihadiri Gubernur Hi.Harun Arrasyid, forum dialog ini juga dihadiri oleh wakil berbagai agama, yaitu Drs.Hi.Israil (Cendekiawan Muslim), Yahya Muhaemin (Kristen). Prof. Mandie (Ketua THDI Hindu NTB), TGKH Ismi (Ulama dari Pondok Pesantren) dan Mgr DR. Benyamin Beriaprojo (Katolik) dan pendeta Slamet (Budha). *Out put* yang dihasilkan dari forum dialog ini adalah bahwa mereka (para tokoh antar agama) mendukung sepenuhnya semua langkah yang diambil pemerintah di dalam memelihara kerukunan pasca konflik 171, serta siap menciptakan keamanan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama di Kota Mataram.

c) Agama Kristen.

Semua agama mengajarkan kedamaian sesuai dengan versinya dan bersama umat beragama lainnya mendukung dan menindaklanjuti tugas FOKOSIDA, oleh sebab itu pendeta Kristen selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan kerukunan pada jamaatnya untuk saling memberikan semangat, kekuatan dan berusaha saling memahami sesama jemaat dan masyarakat karena kekuatan dan semangat tidak akan datang dengan sendirinya tanpa saling pengertian dan kerjasama. Bagi umat Kristen yang mengedepankan cinta kasih, kerusuhan adalah ujian, jemaat harus mengambil maksud Tuhan yang terkandung dibalik kerusuhan 171 dan kerusuhan itu dijadikan acuan untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Secara eksternal, tokoh Kristen selalu terlibat di dalam segala kegiatan, pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah FOKOSIDA, di dalam memelihara kerukunan pasca kerusuhan. Wujud dari kepedulian ini mereka melakukan ikrar melalui RRI Mataram pada Januari 2000, untuk menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat terutama di Kota Mataram dan bertekad untuk meningkatkan kerukunan, saling memberi kekuatan, saling menghormati antar sesama warga Kota Mataram.

d) Agama Hindu.

Telah dikemukakan bahwa agama Hindu mentaati dan bertanggung jawab atas seruan kerukunan dan berperan untuk menindaklanjuti keputusan FOKOSIDA di dalam memelihara kerukunan pasca kerusuhan di Kota Mataram. Seperti agama-agama lain agama Hindu selalu mengikuti segala

kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, instansi terkait maupun forum komunikasi antar umat beragama, antara lain yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Katolik

Menurut salah seorang informan, bahwa agama Hindu memiliki sebuah sistem sosial yang disebut dengan awik-awik. Awik-awik adalah tata aturan sebagai salah satu wadah kebersamaan dalam kehidupan sosial intern agama Hindu. Pasca kerusuhan 171, awik-awik juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Mataram sebagai salah satu lembaga untuk memelihara kerukunan umat beragama pasca kerusuhan 171 di Kota Mataram. Dalam kehidupan masyarakat, peran awik-awik nampak terlihat, mereka saling menghargai dan saling menghormati dalam hidup dan kehidupan, antara lain misalnya babi harus dipelihara dengan baik, tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Ketika terjadi kematian, masyarakat Hindu pun turut berduka cita, membantu di dalam persiapan penguburan, bahkan mereka mengantar mayat sampai kekuburan, demikian pula sebaliknya.

e) Agama Budha

Agama Budha adalah salah satu agama yang cinta damai sebab sang Budha Gautama mengajarkan kepada seluruh alam karena tanpa perdamaian tidak mungkin seseorang bisa menuju nirwana, oleh sebab itu dimana pun kaum Budha berusaha hidup dalam kedamaian, baik secara intern maupun ekstern. Oleh karena Agama Budha memegang suatu prinsip; "kalau mau damai dengan orang lain ciptakanlah kedamaian di dalam diri setiap individu". Itu berarti kalau mau dihormati hormatilah orang lain dan di dalam hidup selalu mawas diri dan melakukan introspeksi diri, jangan karena kita, orang Iain menderita.

Pasca kerusuhan 171 menurut Slamet (salah seorang tokoh Budha), mereka selalu terlibat bersama-sama dengan agama lain sebagai tim peduli pengungsi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Mataram, mereka memberikan bantuan materi berupa uang, makanan dan pakaian. Turut serta dengan agama Islam dan agama Hindu menjemput pengungsi seperti layaknya orang Islam menjemput jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekah. Hal ini diperkuat oleh Drs. Hi. Syahdan Kepala Tata Usaha Kan tor Depertemen Agama Kota Mataram karena pendeta Budha Romo Slemet paling mudah diajak kerjasama terutama di dalam memelihara kerukunan pasca kerusuhan 171.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kerusuhan di Kota Mataram terjadi pada tanggal 17 Januari 2000, sehingga kerusuhan tersebut disebut kerusuhan Satu Tujuh Satu (171). Kerusuhan ini terjadi setelah tablig akbar di lapangan umum Mataram sebagai salah satu bentuk solidaritas kaum Muslimin Kota Mataram terhadap kaum Muslimin yang tertindas di Ambon. Momen ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk melakukan kerusuhan, seakan-akan kerusuhan ini dilakukan oleh jamaah yang mengikuti tablig akbar.

Kerusuhan yang terjadi di Kota Mataram mudah diredam, masyarakat hanya ikut-ikutan terlibat dalam kerusuhan tersebut. Umumnya masyarakat Sasak Muslim sangat patuh pada ulama favoritnya yang dikenal dengan istilah Tuan Guru, artinya penyelesaian masalah dalam masyarakat tergantung dari Tuan Guru karena ucapan Tuan Guru dianggap fatwa.

Di dalam memelihara kerukunan umat beragama pasca kerusuhan 171, pemerintah Kota Mataram membentuk suatu lembaga yang dikenal dengan FOKOSIDA (Forum Komunikasi Situasi Daerah), bertugas memantau situasi dan kondisi daerah Kota Mataram Fokosoda diketuai oleh WaliKota Kota Mataram (Hi. Muhamad Ruslan. SH), anggotanya semua instansi termasuk Departemen Agama, dinas-dinas, MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Kota Mataram. Selain itu juga terdapat forum komunikasi intern dan antar umat beragama, yang di dalam dinamikanya semua dikoordinir oleh FOKOSIDA.

Setelah terjadinya kerusuhan 171 yang melibatkan kaum Muslimin (mayoritas) dan umat Kristiani (minoritas) di Kota Mataram, maka gugur pendapat yang menganggap bahwa apabila kaum Muslimin mayoritas maka terlindunglah kaum minoritas

B. Saran.

Diharapkan pada pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat membentuk FOKOSIDA pada setiap Kabupaten dan Kota, terutama di daerah yang pernah terjadi kerusuhan dan pada daerah yang rawan kerusuhan untuk memudahkan pemantauan. Mengantisipasai setiap kemungkinan terjadi dan terulangnya kerusuhan, merupakan salah satu metode yang efektif untuk memelihara kerukunan di daerah pasca kerusuhan.

Hendaklah kegiatan IMTAK yang diterapkan oleh pemerintah Kota Mataram dalam wilayahnya yang dilaksanakan pada setiap hari *Krida* dilakukan pula oleh pemerintah Kota dan Kabupaten lain di Indonesia dan terutama di Nusa Tenggara Barat, untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah hanya memperhatikan salah satu agama saja. Jadi semua agama diberi kesempatan untuk membenahi diri dalam melaksanakan ajaran agamanya di mana saja sesuai dengan kondosi dan ajaran agamanya masingmasing, termasuk di sekolah dan instansi pemerintah.

Mendorong tumbuhnya kembali prakarsa kerukunan yang tumbuh dari bawah (masyarakat) melalui revitalisasi nilai budaya dan agama yang mengkondisikan kerukunan hidup dalam masyarakat, seperti yang dilakukan oleh dua orang guru agama SMP dan SMA di Kota Mataram, mereka berijtihad dan hasilnya menjadi acuan bahwa setiap hari *Krida* dijadikan hari pembinaan IMTAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mursyid dalam Muhaimin AG (Ed), Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta, 2003.
- Azra, Asyumardi, Sistem Siaga DM Untuk Kerusuhan Sosial, Litbang Agama dan PPIM-IAIN, Jakarta, 1999.
- Fedayani, Ahmad Syaifuddin, Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Dalam Agama Islam, CV. Rajawali, Jakarta 1986.
- Hakim, Basri. A dalam DR. Hi. Muhaimin, AG. MA, Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia, Seri II, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Jakarta, 2003.
- Koentjaraningrat, Masalah Kesukubangsaan Dan Integrasi Nasional Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kamil, Taufik H. Drs, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Dan Urusan Haji, Jakarta, 2004.

- Mudzhar, Atho M, dalam Muhaimin AG (Ed), Dclmai Di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Iskandar, Muhaemin, Drs, dalam DR. Hi. Muaimin AGMA, Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia, Seri II, Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagaman, Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup umat Beragama, Jakarta, 2003.
- Rahman, Darmawan Mas'ud, Puang Dan Daeng, Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar, Disertasi tidak Diterbitkan, PP Unhas, Makassar, 1998.
- Suparlan, Parsudi dalam Abd. Azis Al Bone dan Arifuddin Ismail (ed). *Profil Kerukunan Hidup Beragama Di Indonesia*, *Buku I*, Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujungpandang (BPLK), Ujungpandang, 1994.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Kayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta, 1974.